



RENCANA KERJA (RENJA)

**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK
PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2026**



**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026 dapat disusun dan diselesaikan dengan baik.

Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan tahunan perangkat daerah yang disusun sebagai penjabaran tahun kedua dari Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025–2029 serta berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026. Dokumen ini menjadi pedoman dalam penyelenggaraan program, kegiatan, dan subkegiatan yang mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan, pemenuhan hak anak, perlindungan khusus anak, peningkatan kualitas keluarga, serta pengelolaan sistem data gender dan anak.

Penyusunan Renja Tahun 2026 dilakukan dengan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya, isu-isu strategis, prioritas pembangunan daerah, arah kebijakan nasional, serta kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, Renja ini diharapkan mampu mewujudkan perencanaan yang lebih efektif, terukur, akuntabel, dan berorientasi pada hasil (result oriented), sehingga dapat memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian target pembangunan Provinsi Sumatera Selatan.

Renja ini juga menjadi dasar bagi penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2026, sekaligus sebagai instrumen pengendalian, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kinerja perangkat daerah.

Kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan, masukan, serta berpartisipasi dalam proses penyusunan dokumen ini. Sinergi dan kolaborasi yang baik diharapkan terus terjalin guna meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Kami menyadari bahwa dokumen ini masih memerlukan penyempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan demi penyempurnaan dokumen perencanaan pada masa yang akan datang.

Akhirnya, semoga Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026 ini dapat menjadi pedoman yang efektif dalam pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah serta memberikan manfaat bagi peningkatan kualitas pembangunan yang responsif gender, ramah anak, dan inklusif di Provinsi Sumatera Selatan.

Palembang, 16 Desember 2025

**KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN
ANAK PROV. SUMSEL,**



MUHAMMAD ZAKI ASLAM, S.IP.,M.Si
Pembina Utama Madya/ IV.d
NIP 197306261993111001

1.1. Latar Belakang.

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan tahunan yang disusun sebagai penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Renja memiliki peran penting sebagai pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah selama satu tahun anggaran, sekaligus menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA).

Penyusunan Renja Tahun 2026 dilaksanakan dalam rangka mendukung pencapaian prioritas pembangunan daerah serta sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan jangka menengah daerah. Selain itu, Renja juga disusun dengan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya, sehingga dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi kinerja perangkat daerah.

Dalam konteks urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, masih terdapat berbagai permasalahan yang memerlukan perhatian serius, antara lain masih tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, belum optimalnya kualitas hidup perempuan, serta perlunya peningkatan partisipasi anak dalam pembangunan. Data beberapa tahun terakhir menunjukkan adanya fluktuasi jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, yang menuntut adanya penguatan sistem perlindungan, layanan yang komprehensif, serta upaya pencegahan yang lebih terintegrasi.

Selain itu, tantangan lain yang dihadapi adalah belum optimalnya pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) di berbagai sektor pembangunan, serta masih terbatasnya kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia dalam memberikan layanan yang responsif gender dan ramah anak. Oleh karena itu, diperlukan perencanaan yang matang, terarah, dan terukur guna memastikan bahwa program dan kegiatan yang dilaksanakan dapat memberikan dampak nyata bagi peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak.

Penyusunan Renja Tahun 2026 juga memperhatikan arah kebijakan nasional, termasuk kebijakan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta isu-isu strategis seperti kesetaraan gender, penguatan kelembagaan

perlindungan perempuan dan anak, pencegahan kekerasan, penanganan korban secara komprehensif, serta peningkatan partisipasi anak dalam proses pembangunan melalui forum anak.

Dengan demikian, Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2026 diharapkan mampu menjadi instrumen yang efektif dalam mengarahkan pelaksanaan program dan kegiatan yang tepat sasaran, terintegrasi, dan berkelanjutan, guna mewujudkan kesetaraan gender serta perlindungan perempuan dan anak di Provinsi Sumatera Selatan.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2026 berpedoman pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Presiden No.12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025 - 2029;
8. Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Selatan No.2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Selatan.
9. Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Nomor 32 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;

10. Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan Nomor 075/KPTS/DPP-PA/2025 tentang Penetapan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan 2025-2029.

1.3. Maksud dan Tujuan.

Maksud

Maksud penyusunan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2026 adalah sebagai pedoman dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi program serta kegiatan pembangunan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak selama satu tahun anggaran.

Tujuan

Tujuan penyusunan Renja ini adalah:

- 1. Menjabarkan program dan kegiatan yang sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah;
- 2. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan;
- 3. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program dan kegiatan;
- 4. Mendukung pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan dalam Renstra DPPPA Provinsi Sumatera Selatan;
- 5. Mewujudkan peningkatan kualitas hidup perempuan dan perlindungan anak secara berkelanjutan.

1.4. Sistematika Penulisan.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN, memuat tentang Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU, menjelaskan tentang Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu

dan Capaian Renstra Perangkat Daerah, Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, Review terhadap Rancangan Awal RKPD, dan Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH, berisikan Telaahan terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah, Program dan Kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH, berisikan rencana kerja dan pendanaan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026.

BAB V PENUTUP

**2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN
2024 DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH**

Pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024 pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan merupakan penjabaran operasional dari Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah serta berpedoman pada arah kebijakan pembangunan daerah dan prioritas pembangunan nasional di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Secara umum, pelaksanaan Renja Tahun 2024 telah berjalan dengan cukup baik dan mampu mendukung pencapaian sasaran strategis perangkat daerah. Berbagai program dan kegiatan yang direncanakan telah dilaksanakan sesuai dengan target yang ditetapkan, baik dari sisi output maupun capaian indikator kinerja, meskipun dalam pelaksanaannya masih dijumpai beberapa kendala dan tantangan.

Pada bidang pemberdayaan perempuan, pelaksanaan kegiatan difokuskan pada peningkatan kualitas hidup perempuan, penguatan peran perempuan dalam pembangunan, serta pengarusutamaan gender di berbagai sektor. Capaian indikator seperti Indeks Pembangunan Gender (IPG), Indeks Ketimpangan Gender (IKG), serta partisipasi perempuan dalam bidang ekonomi dan sosial menunjukkan tren yang positif, meskipun masih diperlukan penguatan koordinasi lintas sektor agar hasil yang dicapai lebih optimal dan berkelanjutan.

Sementara itu, pada bidang perlindungan perempuan dan anak, kegiatan diarahkan pada peningkatan pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak, penguatan layanan pengaduan, serta optimalisasi peran Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA). Layanan pengaduan dan penanganan kasus, termasuk melalui mekanisme hotline nasional dan layanan rujukan, telah berjalan dan memberikan dampak positif terhadap peningkatan akses masyarakat terhadap layanan perlindungan. Namun demikian, keterbatasan sumber daya manusia, sarana prasarana, serta luasnya wilayah layanan masih menjadi tantangan yang perlu mendapat perhatian lebih lanjut.

Dari aspek pelaksanaan anggaran, realisasi anggaran Tahun 2025 secara umum menunjukkan tingkat penyerapan yang baik dan selaras dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Meski demikian, terdapat beberapa kegiatan yang realisasinya belum optimal akibat penyesuaian kebijakan, keterlambatan administrasi, serta dinamika kebutuhan di lapangan yang memerlukan penyesuaian perencanaan.

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2024 tersebut, dapat disimpulkan bahwa kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan telah menunjukkan kontribusi positif dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah. Ke depan, diperlukan peningkatan kualitas perencanaan, penguatan koordinasi lintas perangkat daerah dan pemangku kepentingan, serta optimalisasi sumber daya agar pelaksanaan Renja pada tahun berikutnya dapat berjalan lebih efektif, efisien, dan tepat sasaran.

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) dan Pencapaian Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan sampai dengan Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Uraian Program/Kegiatan/Sub kegiatan				Target	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK					11,569,576,000	11,038,708,314			
I.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			Meningkatnya tata kelola pemerintah yang baik (100%)	8,979,903,000	8,547,240,016			
	A.	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (100%)	10,000,000	9,977,000			
		1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (6 Dokumen)	5,000,000	4,985,000	Tidak ada permasalahan, pertanggungjawaban sesuai kebutuhan.	Dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dokumen Perencanaan yang disusun	

		2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5,000,000	4,992,000	Tidak ada permasalahan, pertanggungjawaban sesuai kebutuhan.	Dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dokumen Laporan Kinerja yang disusun	
	B.		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan yang Terlaksana (100 %)	7,421,302,200	7,050,268,480			
		1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (39 Orang)	6,512,082,200	6,147,474,424	Tidak ada permasalahan, pertanggungjawaban sesuai kebutuhan.	Disesuaikan dengan kebutuhan pegawai yang ada di DPPPA Provinsi Sumatera Selatan	
		2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (1 Dokumen)	675,700,000	672,981,000	Tidak ada permasalahan, pertanggungjawaban sesuai kebutuhan.	Disesuaikan dengan kebutuhan tenaga honor administrasi kantor yang ada di DPPPA Provinsi Sumatera Selatan	
		3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Orang yang Menerima Honorarium Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (33 Orang)	183,520,000	179,869,500	Tidak ada permasalahan, pertanggungjawaban sesuai kebutuhan.	Disesuaikan dengan SBU dan kebutuhan tenaga administrasi keuangan kantor DPPPA Prov. Sumsel.	
		4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (2 Laporan)	50,000,000	49,943,556	Tidak ada permasalahan, pertanggungjawaban sesuai kebutuhan.	Dilaksanakan sesuai dengan dokumen Laporan Keuangan yang disusun	
	C.		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah (100%)	35,000,000	22,820,000			
		1	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	35,000,000	22,820,000	Tidak ada permasalahan, pertanggungjawaban sesuai kebutuhan.	Dilaksanakan sesuai dengan Laporan Penatausahaan BMD DPPA	

							yang disusun	
	D.	Administrasi Kepengawasan Perangkat Daerah		Persentase Administrasi Kepengawasan yang Terlayani (100 %)	35,000,000	34,663,778		
		1	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah pegawai yang mengikuti Bimbingan Teknis implementasi perundang - undangan (6 Orang)	35,000,000	34,663,778	Tidak ada permasalahan, pertanggung- gungjawaban sesuai kebutuhan.	Koordinasi yang baik dan penjadwalan sebelumnya
	E.	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Administrasi Umum yang Terlaksana	700,000,800	696,475,105		
		1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (1 Paket)	15,000,000	14,973,000	Tidak ada permasalahan, pertanggung- gungjawaban sesuai kebutuhan.	Dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan kantor yang diperlukan.
		2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (1 Paket)	50,000,000	49,755,000	Tidak ada permasalahan, pertanggung- gungjawaban sesuai kebutuhan.	Dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor yang diperlukan.
		3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (8 Paket)	160,000,000	158,419,560	Tidak ada permasalahan, pertanggung- gungjawaban sesuai kebutuhan.	Dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan alat tulis kantor, peralatan kebersihan dan bahan pembersih yang digunakan pada kantor DPPPA Prov. Sumsel
		4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (4 Paket)	40,000,000	39,914,000	Tidak ada permasalahan, pertanggung- gungjawaban sesuai kebutuhan.	Dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan cetakan dan penggandaan kantor DPPPA Prov. Sumsel

		5	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (1 Laporan)	20,000,000	19,149,000	Tidak ada permasalahan, pertanggungjawaban sesuai kebutuhan.	Dilaksanakan sesuai dengan kunjungan tamu yang ada di kantor DPPPA Prov. Sumsel	
		6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan RapatKoordinasi dan Konsultasi SKPD (2 Laporan)	415,000,800	414,264,545	Tidak ada permasalahan, pertanggungjawaban sesuai kebutuhan.	Dilaksanakan sesuai dengan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi kantor DPPPA Prov. Sumsel	
	F	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan		Persentase Jasa Penunjang yang Tersedia (100 %)	410,000,000	369,149,614			
		Daerah							
		1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (1 Laporan)	275,000,000	235,094,614	Tidak ada permasalahan, pertanggungjawaban sesuai kebutuhan.	Perencanaan anggaran berdasarkan analisa kebutuhan ditambah perkiraan kenaikan tarif	
		2	Penyediaan Jasa Peralatan dan 						

		3	Penyediaan Jasa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (1 Laporan)	105,000,000	104,410,000	Tidak ada permasalahan, pertanggung jawaban sesuai kebutuhan.	Dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan jasa pelayanan umum kantor yang digunakan DPPPA Prov. Sumsel	
			Pelayanan Umum Kantor						
	G		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (100 %)	368,600,000	363,886,039			
		1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (18 Unit)	275,000,000	270,654,560	Tidak ada permasalahan, pertanggung jawaban sesuai kebutuhan.	Disesuaikan dengan jumlah kebutuhan pemeliharaan kendaraan dinas operasional atau lapangan pada kantor DPPPA Prov. Sumsel	
			Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						
		2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara (6 Unit)	20,000,000	19,895,000	Tidak ada permasalahan, pertanggung jawaban sesuai kebutuhan.	Disesuaikan dengan jumlah kebutuhan pemeliharaan unit komputer dan peralatan komputer lainnya pada kantor DPPPA Prov. Sumsel	
		3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi (1 Gedung)	73,600,000	73,336,479	Tidak ada permasalahan, pertanggung jawaban sesuai kebutuhan.	Disesuaikan dengan kebutuhan pemeliharaan gedung kantor tahun 2024	
II.			PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase ARG pada Belanja Langsung APBD	999,250,000	962,087,751			

	A.	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi	Persentase Kabupaten/Kota dan OPD Provinsi yang melaksanakan PPRG (100%)	200,000,000	185,914,090			
		1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan	200,000,000	185,914,090	Masih lemahnya sinergi serta komitmen antara 4 driver baik provinsi maupun kabupaten/kota	Pelaksanaan pembinaan yang dilakukan secara berkesinambungan kepada 4 driver melalui rapat koordinasi yang dilakukan langsung melalui visitasi ke kabupaten/kota yang bersangkutan maupun melalui media social wa group dan rakor provinsi	
		Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Provinsi (1 Dokumen)					
	B.	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah Jenis Kegiatan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan (4 Jenis)	80,000,000	78,129,340			
		Kewenangan Provinsi						

		1	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mengikuti Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan Di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi (10 Organisasi)	80,000,000	78,129,340	Kendala yang dihadapi adalah belum semua Kabkota menindaklanjuti program/kegiatan ini, sehingga masih banyak Model Desa Prima yang berjalan tanpa pembinaan dari kabkota	Diharapkan Kabkota untuk melakukan penganggaran kegiatan sejenis dan melakukan kegiatan sebagai tindak lanjut dari apa yang sudah dibentuk provinsi	
	C.		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah Lembaga Layanan Perempuan yang Dilakukan Penguatan dan Pengembangan (45 Lembaga)	719,250,000	698,044,321			
		1	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan (45 Lembaga)	630,000,000	611,642,986	Keterbatasan Sumber Daya, diantaranya kekurangan dana, tenaga kerja terlatih, atau fasilitas yang memadai dalam pelaksanaan program kegiatan dan sering kali dihadapkan pada stigma sosial terkait dengan peran perempuan dalam masyarakat. Hal ini bisa menghambat penerimaan masyarakat terhadap	Peningkatan Kapasitas SDM dan Pendekatan Kolaboratif dengan Meningkatkan kerjasama dengan berbagai pihak terkait, seperti pemerintah, lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan sektor swasta, untuk memperluas jangkauan dan dampak program.	

			Perempuan Kewenangan Provinsi				program-program yang dilaksanakan.		
		2	Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi yang Mendapat Peningkatan Kapasitas (100 Orang)	Jumlah Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi yang Mendapat Peningkatan Kapasitas (100 Orang)	70,000,000	67,211,022	Lokasi DRPPA yang jauh ke Kabupaten sehingga tidak memungkinkan untuk dilakukan monev secara bersama-sama untuk beberapa Desa di satu tempat, sehingga kurang efisien waktu dan biaya yang dikeluarkan serta hampir semua DRPPA baru sebatas pembentukan, belum ada kegiatan yang benar-benar mendukung pemenuhan indikator DRPPA.	Memaksimalkan output pelaksanaan Koordinasi DRPPA agar dapat diketahui	
							capaian program, permasalahan dan upaya mengatasinya pada masing-masing		
							DRPPA di Sumatera Selatan.		
		3	Pengembangan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi yang Tersedia (1 Dokumen)	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi yang Tersedia (1 Dokumen)	19,250,000	19,190,313	Anggaran yang terbatas dan juga mengalami efisiensi	melakukan sinergi dan kolaborasi dengan berbagai	
							pihak baik pemerintah maupun swasta untuk memfasilitasi kegiatan baik		

							berupa bantuan material (pembiayaan, sarana dan prasarana) maupun immaterial	
III.	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN		Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan Termasuk TPPO per 100.000 Penduduk Perempuan (11,25)	315,000,000	284,671,350			
	A.	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif (100%)	120,000,000	93,281,102			
		1	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah	40,000,000	35,149,192	Terbatasnya SDM (Tenaga Ahli dan staf terlatih dalam menangani kasus perlindungan perempuan termasuk TPPO	Meningkatkan koordinasi antar lembaga (rumah sakit, polisi, pengadilan, dan lembaga perlindungan lainnya) dalam pelaksanaan pelayanan terhadap korban kekerasan.	
			Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota					
		2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan	80,000,000	58,131,910	Terbatasnya SDM (Tenaga Ahli dan staf terlatih dalam menangani kasus perlindungan perempuan	Meningkatkan koordinasi antar lembaga (rumah sakit, polisi, pengadilan, dan lembaga perlindungan	

			Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi				termasuk TPPO	an lainnya) dalam pelaksanaan pelayanan terhadap korban kekerasan.	
	B.	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi		Meningkatnya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi yang meningkat Kapasitasnya (25 Lembaga)	195,000,000	191,390,248			
		1	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan	Jumlah sumber daya lembaga layanan penanganan bagi perempuan korban kekerasan kewenangan provinsi yang mendapatkan peningkatan kapasitas (18 Orang)	135,000,000	133,062,248	Tidak ada kendala yang berarti hanya kendala teknis pada saat kegiatan	Pelaksanaan dilakukan sesuai dengan rincian kebutuhan kegiatan	
			Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi						
		2	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan	Jumlah dokumen hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota (1 Dokumen)	60,000,000	58,328,000	Masih minimnya kegiatan yang dilakukan oleh Forum PUSPA itu sendiri	Forum PUSPA adalah Forum Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak diharapkan bisa dihimpun dari masing-masing anggota tersebut berasal	
			Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota						
IV.	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA			Indeks Perlindungan Anak (IPA) (68,00)	182,423,000	180,040,447			
	A.	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan		Jumlah Media KIE Peningkatan Kualitas Keluarga (2 Media)	150,000,000	148,533,522			

		Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi							
		1	Pelaksanaa n Komunikasi, Informasi, Edukasi KG dan Perlindunga n Anak bagi Keluarga Kewenanga n Provinsi	Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak Kewenangan Provinsi yang Tersedia (1 Dokumen)	150,000,000	148,533,522	Terbatasny a waktu penyeleng garaan seleksi penerima penghargaan an dan Kabupaten /kota belum optimal dalam merespon dan mendukung g penyeleng garaan seleksi penerima penghargaan an di tingkat daerah	Waktu penyeleng garaan seleksi akan diperpanja ng serta system penyeleksi an juga harus diperbahar ui sehingga daerah dapat melakukan seleksi lebih baik lagi. Diharapka n dengan mengguna kan system penyeleksi an yg lebih awal dan selektif diharapkan penerima penghargaan an yang terpilih memang benar-benar yg sudah terselektif untuk mewakili daerah masing-masing	
	B.	Penyediaan Layanan Bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya Lintas Daerah Kab/Kota		Jumlah Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pelayanan Keluarga (5 Kab/Kota)	32,423,000	31,506,925			
		1	Pelaksanaa n Penyediaan Layanan Komprehen sif bagi keluarga dalam mewujudkan KG dan Perlindunga n Anak yang wilayah	Jumlah Layanan Komprehensif bagi keluarga dalam mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota (1 Layanan)	32,423,000	31,506,925	Belum terbentukn ya dan Belum optimalnya Kelembaga an Puspaga Provinsi dan Kab/Kota	Pembentuk an Kelembaga an Puspaga Provinsi Sumsel yang sesuai standar	

			kerjanya Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota						
V.	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK			Persentase ARG pada Belanja Langsung APBD	140,000,000	130,404,460			
	A.	<i>Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi</i>		Persentase Keterisian Data Terpilah pada Sistem Informasi Gender dan Anak (SIGA) (60,25%)	140,000,000	130,404,460			
		1	Penyediaan Data Gender	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Provinsi yang Tersedia (1 Dokumen)	110,000,000	104,224,460	Data yang didapat berbeda dengan yang dibutuhkan sehingga masih perlu untuk diolah	Dibutuhkan Aplikasi Data yang bisa mensupport untuk kebutuhan data dengan update aplikasi.	
			dan Anak Provinsi						
		2	Penyajian dan Pemanfaata n Data	Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data (1 Dokumen)	30,000,000	26,180,000	Data - Data yang diperlukan memerluka n waktu didapatkan dari sumber- sumber terkait	Data yang diperoleh masih belum lengkap dan belum terpilah	
			Gender dan Anak dalam Kelembaga an Data Provinsi						
VI.	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)			Indeks Perlindungan Anak (IPA) (68,00)	303,000,000	298,785,626			
	A.	<i>Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi</i>		Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi yang Mendapatkan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak	135,000,000	133,694,164			

			Anak (17 Organisasi)						
		1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi (1 Dokumen)	50,000,000	49,806,005	Belum optimalnya kebijakan pembangunan daerah yang responsif hak anak	Mengusulkan Pembuatan Peraturan Daerah dan aturan pelaksanaannya tentang Perlindungan Anak	
		2	Advokasi, Sosialisasi dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	Jumlah Perangkat Daerah yang mempunyai dokumen pembangunan daerah yang responsif hak anak dan berperan aktif dalam gugus tugas KLA tingkat Provinsi yang berfungsi	85,000,000	83,888,159	Belum optimalnya peran aktif Gugus Tugas KLA tingkat Provinsi dan Kab/Kota	Mengadvokasi dan Bimtek bagi Gugus Tugas KLA Provinsi dan Kab/Kota	
	B.	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi		Jumlah Lembaga yang Meningkatkan Pengetahuannya tentang Kualitas Hidup Anak(17 Lembaga)	168,000,000	165,091,462			

		1	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan KualitasHidup Anak Kewenangan Provinsi (1 Dokumen)	168,000,000	165,091,462	Belum beraninya anak - anak menyampa iakn suara dan masih kurangnya ruang ramah anak di Daerah	Diikutdsert akan anak dan juga Forum Anak dalam proses pengambil an keputusan tentang segala sesuatu yang berhubung an dengan dirinya dan dilaksanak an atas kesadaran, pemahama n serta kemauan bersama sehingga anak dapat menikmati hasil atau mendapatk an manfaat dari pembangu nan	
			Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkata n Kualitas						
			Hidup Anak Kewenanga n Provinsi						
VII.			PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Rasio Kekerasan Terhadap Anak per 10.000 Anak (1,15)	650,000,000	635,478,664			
	A.		<i>Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kot a</i>	Jumlah Peserta Pencegahan Kekerasan Anak (200 Peserta)	90,000,000	87,649,848			

		1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi (1 Dokumen)	50,000,000	49,997,078	Masih banyak masyarakat yang belum sepenuhnya menyadari tentang bentuk kekerasan terhadap anak atau mengangapnya sebagai hal yang wajar, seperti hukuman fisik. Hal ini menghambat upaya pencegahan dan intervensi di tingkat keluarga maupun masyarakat.	Peningkatan Pendidikan dan Pengetahuan dengan Mengedukasi orang tua, guru, dan masyarakat mengenai hak-hak anak dan cara mendeteksi tanda-tanda kekerasan sejak dini sangat penting.	
		2	Advokasi dan Pendampingan Perangkat Daerah dalam Pelaksanaan Kebijakan/Program/Kegiatan Pencegahan KTA Kewenangan Provinsi	Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan/program/kegiatan pencegahan KTA kewenangan Provinsi	40,000,000	37,652,770	Masih terbatasnya akses terhadap layanan kesehatan, psikologis, dan sosial untuk anak korban kekerasan di beberapa daerah	Penguatan Peran Lembaga Perlindungan Anak dengan lebih proaktif dalam melakukan pemantauan terhadap kasus kekerasan terhadap anak.	
	B.	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi		Persentase Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan Komprehensif (100%)	30,000,000	29,460,020			

		1	Penyediaan Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	Jumlah Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Mendapatkan layanan pengaduan (50 Orang)	30,000,000	29,460,020	Terbatasnya SDM (Tenaga Ahli dan staf terlatih dalam menangani kasus perlindungan anak	Meningkatkan koordinasi antar lembaga (rumah sakit, polisi, pengadilan, dan lembaga perlindungan lainnya) dalam pelaksanaan pelayanan terhadap korban kekerasan.	
			Kewenangan Provinsi						
	C.		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Layanan Perlindungan Anak yang bersinergi (3 Lembaga)	530,000,000	518,368,796			
		1	Pengembangan Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) perlindungan khusus anak kewenangan provinsi	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi (1 Dokumen)	30,000,000	26,173,350	Permasalahan internal adalah terbatasnya sumber daya manusia yang ada di Dinas penyelenggara, sedangkan eksternal adalah upaya untuk melakukan kegiatan dengan orang banyak dalam waktu bersamaan	Permasalahan internal adalah terbatasnya sumber daya manusia yang ada di Dinas penyelenggara, sedangkan eksternal adalah upaya untuk melakukan kegiatan dengan orang banyak dalam waktu bersamaan	

							Pelatihan dan Pengembangan Profesional seperti menyediakan program pelatihan yang spesifik untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan SDM, termasuk pelatihan terkait pengenalan terhadap kebutuhan spesifik AMPK, seperti pemahaman tentang jenis-jenis disabilitas, teknik intervensi yang tepat, serta cara berkomunikasi dengan anak-anak yang memiliki kebutuhan khusus.
						Kurangnya Sumber Daya yang Terintegrasi dimana lembaga penyedia layanan bekerja secara terpisah-pisah, tidak ada sistem yang saling terintegrasi antara berbagai lembaga yang menangani AMPK (seperti lembaga pendidikan, kesehatan, kepolisian, dan sosial).	
	2	Peningkatan Kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK kewenangan Provinsi	Jumlah SDm Penyedia Layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMPK Kewenangan Provinsi (400 Orang)	500,000,000	492,195,446		

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis kinerja pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan indikator kinerja utama yang sudah ditentukan dalam RPD Dinas Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024-2026. Analisis Kinerja Pelayanan dapat digambarkan pada tabel 2.2 sebagai berikut :

Tabel 2.2. Capaian Kinerja DPPPA 2024

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Satuan	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Tahun 2024	Capaian Kinerja Tahun 2024	Ket
I	Meningkatkan Pembangunan Responsif Gender serta Perlindungan Anak		Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	93,00	93,25	
			Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks	75,00	76,58	
			Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Indeks	62,00	62,01	
		1.1 Meningkatkan Kualitas Hidup Perempuan	Persentase ARG (Anggaran Responsif Gender) pada belanja langsung APBD	%	22,00	42,08	
			Proporsi perempuan sebagai profesional, teknisi dan manajerial (Non Pemerintah)	%	57,15	54,24	
			Persentase perempuan pada jabatan struktural	%	35,80	36,59	
			Tingkat Partisipasi angkatan kerja	%	54,50	55,35	
		1.2 Meningkatkan perlindungan perempuan dan perlindungan khusus anak	Rasio Kekerasan terhadap perempuan , termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang Per 100.000 Penduduk Perempuan	Nilai	8 -10	6,15	Indikator negatif (semakin kecil semakin baik)

			Rasio Kekerasan terhadap anak Per 10.000 Anak	Nilai	0,75-1,5	1,32	Indikator negatif (semakin kecil semakin baik)
			Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)	Indeks	68,00	71,11	
		1.3 Meningkatkan pemenuhan hak anak	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)	Indeks	58,00	60,19	
II	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel	2.1 Meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi	Nilai SAKIP	Nilai	A (81,00-85,00)	84,52	

Realisasi Kinerja Anggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024

dengan rincian sebagai berikut :

Uraian	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran (Rp)	Keuangan (%)		Fisik (%)	
			Target s.d. Bulan Des	Realisasi s.d. Bulan Des	Target s.d. Bulan Des	Realisasi
1	2	3	4	(5 = 3/2 *100%)	6	7
Total Belanja	11.569.576.000,-	11.038.708.314,-	100	95,41	100	100
Belanja Operasi	11.445.976.000,-	10.915.616.835,-	100	95,37	100	100
- Belanja Pegawai	6.693.402.200,-	6.325.144.424,-	100	94,50	100	100
- Belanja Barang dan Jasa	4.752.573.800,-	4.590.472.411,-	100	96,59	100	100
Belanja Modal	123.600.000,-	123.091.479,-	100	99,59	100	100
- Belanja Modal Peralatan dan Mesin	50.000.000,-	49.755.000,-	100	99,51	100	100
- Belanja Gedung dan Bangunan	73.600.000,-	73.336.479,-	100	99,64	100	100

1) Realisasi Total Belanja

Realisasi Keuangan Total Belanja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan sampai dengan Bulan Desember Tahun Anggaran 2024 dari

pagu Rp. **11.569.576.000,-** , realisasi sebesar Rp.**11.038.708.314,-** atau 95,41 % dan realisasi fisik 100 %

2) Realisasi Belanja Operasi

Realisasi Keuangan Belanja Operasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan sampai dengan September Tahun Anggaran 2024 dari pagu Rp.**11.445.976.000,-** terealisasi Rp.**10.915.616.835,-** atau 95,37% dan realisasi fisik 100 %, terdiri dari :

- Belanja Pegawai Rp.6.693.402.200,- terealisasi Rp.6.325.144.424,- atau 94,50% dan realisasi fisik 100 %
- Belanja Barang dan Jasa Rp.4.752.573.800,- terealisasi Rp.4.590.472.411,- atau 96,59% dan realisasi fisik 100 %

3) Realisasi Belanja Modal

Realisasi Keuangan Modal Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan sampai dengan September Tahun Anggaran 2024 dari pagu Rp.**123.600.000,-** terealisasi Rp.**123.091.479,-** atau **99,59%** dan realisasi fisik 100%, terdiri dari :

- Belanja Modal Peralatan dan Mesin sampai dengan September Tahun Anggaran 2024 dari pagu Rp.50.000.000,- terealisasi Rp.49.755.000,- atau 99,51% dan realisasi fisik 100 %
- Belanja Modal Gedung dan Bangunan sampai dengan September Tahun Anggaran 2024 dari pagu Rp.73.600.000,- terealisasi Rp.73.336.479,- atau 99,64% dan realisasi fisik 100%.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Provinsi Sumatera Selatan, terdapat sejumlah isu strategis yang perlu mendapat perhatian dalam penyusunan Rencana Kerja Tahun 2026. Isu-isu ini muncul sebagai hasil evaluasi kinerja, dinamika kebijakan nasional, serta kondisi aktual di daerah.

1. Masih Tingginya Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak

Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak masih menunjukkan tren yang fluktuatif dengan kecenderungan meningkat pada beberapa tahun terakhir. Hal ini dipengaruhi oleh faktor sosial, ekonomi, serta rendahnya kesadaran masyarakat dalam pencegahan dan pelaporan. Selain itu, masih terdapat fenomena *underreporting* yang menyebabkan data belum sepenuhnya mencerminkan kondisi riil di lapangan.

2. Belum Optimalnya Kualitas Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak

Ketersediaan dan kualitas layanan bagi korban kekerasan, baik melalui UPTD PPA maupun lembaga layanan lainnya, masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan SDM terlatih, sarana prasarana, serta belum meratanya standar layanan di seluruh kabupaten/kota.

3. Rendahnya Pemberdayaan Perempuan dalam Bidang Ekonomi dan Pengambilan Keputusan

Partisipasi perempuan dalam pembangunan, khususnya di sektor ekonomi dan posisi pengambilan keputusan, masih belum optimal. Hal ini ditunjukkan oleh masih adanya kesenjangan akses terhadap sumber daya ekonomi, pelatihan, dan peluang usaha.

4. Belum Optimalnya Implementasi Pengarusutamaan Gender (PUG)

Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) di perangkat daerah dan kabupaten/kota masih belum merata. Hal ini terlihat dari belum optimalnya integrasi perspektif gender dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan.

5. Perlindungan Khusus Anak yang Belum Maksimal

Permasalahan anak seperti kekerasan, eksploitasi, perkawinan anak, dan anak berhadapan dengan hukum masih menjadi isu penting. Upaya perlindungan khusus anak memerlukan penguatan koordinasi lintas sektor serta peningkatan kapasitas lembaga layanan.

6. Keterbatasan Data Gender dan Anak yang Terpilah dan Terintegrasi

Ketersediaan data yang valid, terpilah, dan terintegrasi masih menjadi tantangan dalam mendukung perencanaan dan pengambilan kebijakan berbasis bukti (*evidence-based policy*).

7. Belum Optimalnya Partisipasi Anak dalam Pembangunan

Partisipasi anak dalam proses perencanaan pembangunan, seperti Musrenbang dan forum konsultasi publik, masih belum berjalan secara optimal dan bermakna. Forum Anak perlu diperkuat baik dari sisi kapasitas maupun ruang partisipasi.

8. Penguatan Kelembagaan dan Sinergi Lintas Sektor

Koordinasi antar perangkat daerah, lembaga layanan, serta pemangku kepentingan lainnya masih perlu ditingkatkan agar program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dapat berjalan lebih efektif dan terintegrasi.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026 dilakukan untuk memastikan keselarasan antara rencana kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Provinsi Sumatera Selatan dengan arah kebijakan pembangunan daerah, prioritas pembangunan nasional, serta target kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan jangka menengah.

Berdasarkan hasil telaahan, Rancangan Awal RKPD Tahun 2026 telah mengakomodasi isu-isu strategis di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, khususnya terkait peningkatan kualitas hidup perempuan, perlindungan anak, serta penguatan kelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG). Hal ini tercermin dalam prioritas pembangunan daerah yang menitikberatkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan perlindungan sosial, serta pengurangan kesenjangan gender.

Namun demikian, terdapat beberapa hal yang menjadi perhatian dalam penyelarasan dengan Renja DPPPA, antara lain:

1. Kesesuaian Program dan Kegiatan

Sebagian besar program dan kegiatan dalam Rancangan Awal RKPD telah selaras dengan tugas dan fungsi DPPPA, seperti program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Namun, masih diperlukan penajaman pada sub kegiatan yang secara langsung menyasar kelompok rentan, khususnya perempuan dan anak korban kekerasan.

2. Sinkronisasi Indikator Kinerja

Indikator kinerja yang tercantum dalam Rancangan Awal RKPD perlu diselaraskan lebih lanjut dengan indikator kinerja DPPPA, terutama terkait indikator outcome seperti penurunan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak serta peningkatan partisipasi perempuan dalam pembangunan.

3. Kesesuaian Target dan Pagu Indikatif

Target kinerja yang ditetapkan dalam RKPD perlu mempertimbangkan capaian tahun sebelumnya serta kemampuan sumber daya yang tersedia. Selain itu, pagu indikatif yang dialokasikan untuk urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak masih perlu dioptimalkan agar mampu menjawab isu strategis yang ada.

4. Penguatan Pendekatan Pengarusutamaan Gender (PUG)

Masih diperlukan penguatan integrasi perspektif gender dalam seluruh program dan kegiatan lintas perangkat daerah, sehingga pelaksanaan PUG tidak hanya menjadi tanggung jawab DPPPA, tetapi menjadi bagian integral dalam perencanaan pembangunan daerah.

5. Dukungan terhadap Perlindungan Khusus Anak

Program yang mendukung perlindungan khusus anak, termasuk pencegahan kekerasan, eksploitasi, dan perkawinan anak, perlu lebih diprioritaskan dan diperkuat melalui sinergi lintas sektor.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat merupakan bagian penting dalam proses penyusunan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Provinsi

Sumatera Selatan Tahun 2026. Usulan tersebut diperoleh melalui berbagai mekanisme partisipatif, antara lain Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), forum konsultasi publik, aspirasi DPRD, serta masukan dari lembaga masyarakat, organisasi perempuan, dan Forum Anak.

Berdasarkan hasil inventarisasi dan verifikasi, usulan masyarakat pada umumnya berfokus pada peningkatan perlindungan perempuan dan anak, pemberdayaan ekonomi perempuan, serta penguatan peran keluarga dan masyarakat dalam pencegahan kekerasan. Adapun beberapa kelompok usulan yang menjadi perhatian antara lain:

1. Penguatan Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak

Masyarakat mengusulkan peningkatan akses dan kualitas layanan bagi korban kekerasan, termasuk penyediaan rumah aman (*shelter*), layanan konseling, pendampingan hukum, serta peningkatan kapasitas SDM pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA).

2. Peningkatan Pemberdayaan Ekonomi Perempuan

Usulan diarahkan pada pelatihan keterampilan, bantuan usaha ekonomi produktif, serta akses permodalan bagi perempuan, khususnya perempuan kepala keluarga dan kelompok rentan lainnya.

3. Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak

Masyarakat mendorong peningkatan kegiatan sosialisasi, edukasi, dan kampanye pencegahan kekerasan, termasuk di lingkungan sekolah, keluarga, dan komunitas.

4. Penguatan Peran Forum Anak dan Partisipasi Anak

Forum Anak di berbagai wilayah mengusulkan peningkatan ruang partisipasi yang aman dan inklusif, serta pelibatan anak secara bermakna dalam proses perencanaan pembangunan daerah.

5. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan SDM

Terdapat usulan terkait pelatihan dan peningkatan kapasitas bagi kader, relawan, dan lembaga layanan masyarakat dalam menangani isu perempuan dan anak.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Dalam perumusan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah selain didasarkan pada rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah juga dilakukan penelaahan terhadap Kebijakan Nasional.

3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Visi dan Misi Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Sumatera Selatan 2025-2029 mencakup beberapa aspek penting dalam rangka mewujudkan arah yang jelas tentang kondisi masa depan yang ingin dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang (*clarity of direction*). Diharapkan Provinsi Sumatera Selatan yang maju ekonominya, berbasiskan pengetahuan dan inovasi yang berakar pada budaya Nusantara. Sumsel menjadi provinsi berdaya saing, Tangguh, inovatif dan adil. Sumsel sebagai provinsi yang berkomitmen untuk terus menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan, pertumbuhan ekonomi tinggi seimbang dengan pembangunan sosial, berkelanjutan sumber daya alam dan kualitas lingkungan hidup serta tata kelola yang baik. Untuk itu, visi Sumatera Selatan 2025-2029 adalah:

"SUMSEL MAJU TERUS UNTUK SEMUA"

Penjelasan visi pembangunan Sumatera Selatan tahun 2025-2030 sebagai berikut:

Sumsel memiliki makna salah satu wilayah di Indonesia yang terletak di bagian Selatan pulau Sumatera. Ibukota Pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan berada di kota Palembang, dan pada akhir tahun 2023 penduduk provinsi ini berjumlah 8.889.913 jiwa. Secara geografis, Sumatera Selatan berbatasan dengan Provinsi Jambi di utara, Provinsi Kepulauan Bangka--Belitung di timur, Provinsi Lampung di selatan dan Provinsi Bengkulu. Provinsi Sumatera Selatan merupakan tempat pusat Kerajaan Sriwijaya pada abad ke-7 hingga

akhir abad ke-14, memiliki luas 9,1 juta hektar atau 4,7 persen dari total luas daratan.

Maju bermakna bergerak, menjadi lebih baik, berkembang menuju kemajuan pembangunan suatu masyarakat atau daerah kabupaten/kota. Kemajuan pembangunan itu dapat pula bersifat fisik dan nonfisik baik untuk lapisan masyarakat maupun daerah kabupaten/kota yang ada di Sumatera Selatan. Pembangunan berkelanjutan tidak hanya berpusat pada Ibukota Provinsi, melainkan diarahkan kepada pemerataan dan keadilan bagi kemajuan kabupaten dan kota dengan mengutamakan kerja sama dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat dengan mengedepankan lingkungan hidup yang berkelanjutan.

Terus bermakna kata berkisinambungan dan berkelanjutan serta tidak berhenti yang merujuk pada kemampuan untuk mempertahankan dan memenuhi kebutuhan manusia saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka. Keberlanjutan melibatkan tiga dimensi utama, yaitu sosial, ekonomi, dan lingkungan. Dalam dimensi sosial, keberlanjutan berarti mampu menciptakan masyarakat yang adil, inklusif, dan berdaya. Dimensi ekonomi mengacu pada kemampuan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan menciptakan lapangan kerja yang layak, dan dimensi lingkungan berfokus pada perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam yang ada.

Semua mengandung arti keadaan atau kondisi seluruh/segenap/sekalian lapisan masyarakat di wilayah Sumatera Selatan menikmati hasil dari kemajuan pembangunan sedangkan dalam konteks wilayah, keadaan atau kondisi kemajuan pembangunan yang dilakukan secara merata dan adil baik di tingkat kabupaten maupun di kota untuk memperkecil ketimpangan antar wilayah.

Implementasi Visi Sumatera Selatan memerlukan kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Partisipasi aktif masyarakat, koordinasi yang baik, serta pengawasan yang efektif juga

diperlukan untuk memastikan implementasi yang berhasil dan berkelanjutan. Dengan upaya yang terarah dan sinergi semua pihak, diharapkan visi ini dapat tercapai dan membawa dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat Sumatera Selatan secara menyeluruh. Misi Pembangunan Provinsi Sumatera Selatan adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan masyarakat Sumatera Selatan yang berkualitas, sehat, cerdas, inovatif, produktif, berakhlak, berkeadilan, dan berkeadaban melalui peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan sumber daya manusia yang berdaya saing.
2. Mewujudkan Ketahanan ekonomi berbasis sumber daya lokal dan berkelanjutan dalam kerangka ekonomi kerakyatan yang berkeadilan untuk meningkatkan pendapatan Masyarakat.
3. Mewujudkan keterkaitan (nexus) yang kuat antara ketahanan pangan, ketahanan energi, dan kedaulatan air sebagai upaya mengatasi perubahan iklim
4. Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang terintegrasi antar kabupaten/kota dan pelayanan dasar yang berkualitas dan ramah lingkungan.
5. Memperluas kesempatan berusaha dan lapangan kerja serta perlindungan sosial yang terjaga untuk menurunkan angka kemiskinan.
6. Meningkatkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik berbasis digital, menuju pelayanan publik yang berkualitas
7. Mewujudkan kehidupan beragama, seni dan budaya dalam masyarakat yang menjunjung tinggi toleransi dan berorientasi pada kearifan lokal.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan berkepentingan untuk memberikan kontribusi untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan, khususnya upaya pemecahan permasalahan yang berkaitan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan memberikan peluang yang seluas-luasnya bagi kaum perempuan untuk membentuk jati dirinya secara proporsional dan bertanggungjawab, dengan memperluas aksesibilitas,

memperkuat partisipasi, peran, kontrol, serta memberikan ruang seluas-luasnya untuk mengenyam manfaat pembangunan dari seluruh aspek kehidupan, semaksimal mungkin melaksanakan perlindungan terhadap perempuan dan anak, pemenuhan hak anak serta mewujudkan sistem data gender dan anak sebagai dasar perencanaan kebutuhan pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang bermuara kepada ketercapaian kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan keluarga, masyarakat, berbangsa dan bernegara.

3.2 Tujuan dan sasaran Renja SKPD

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan mendukung Misi 1 yaitu : **Mewujudkan masyarakat Sumatera Selatan yang berkualitas, sehat, cerdas, inovatif, produktif, berakhlak, berkeadilan, dan berkeadaban melalui peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan sumber daya manusia yang berdaya saing.**

Tujuan 1. Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia

Peningkatan kualitas sumber daya manusia merupakan upaya yang perlu dilakukan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan kualitas sumber daya manusia mencakup pembangunan manusia di berbagai aspek kehidupan masyarakat khususnya kesehatan dan pendidikan dalam rangka mewujudkan masyarakat yang memiliki kualitas hidup yang baik dari sisi jasmani dan rohani, memiliki produktivitas yang tinggi, berpendidikan, dan profesional sehingga memiliki kompetensi yang baik dan mampu berdaya saing.

Sasaran:

- 1) Meningkatnya Pemerataan Pelayanan Pendidikan Kewenangan Provinsi
- 2) Meningkatnya Kualitas Pendidikan Kewenangan Provinsi
- 3) Meningkatnya Keterampilan Sumber Daya Manusia
- 4) Meningkatnya Budaya Literasi di Sumatera Selatan
- 5) Meningkatnya Derajat Kesehatan

- 6) Meningkatnya Pembangunan Sektor Kepemudaan
- 7) **Meningkatnya Kesenjangan Gender**
- 8) **Meningkatnya Upaya Perlindungan Anak**

Tujuan dan sasaran jangka menengah yang akan dicapai Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan sebagai berikut :

Tujuan I Meningkatkan Kesenjangan Gender dan Perlindungan Anak

- Sasaran 1.1 Meningkatnya Kualitas Hidup Perempuan;
- 1.2 Meningkatnya Pemenuhan Hak Anak;
- 1.3 Meningkatnya Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak.

Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029 dirumuskan sebagai berikut :

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran DPPPA Provinsi Sumsel Tahun 2026

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE	TARGET TAHUN	KET.
				2024	2026	
1	2	3	4	5	6	7
Meningkatnya Kesenjangan Gender	Meningkatkan Kesenjangan Gender dan Perlindungan Anak	1.1 Meningkatnya Kualitas Hidup Perempuan	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0,479	0.453	Indikaor negatif
Meningkatnya Upaya Perlindungan Anak			Indeks Pembangunan Gender (IPG)	93,87	93,99–94,10	Indikaor positif
			Tingkat Partisipasi angkatan kerja perempuan	55,35%	57,30%	Indikaor positif

		1.2 Meningkatnya Pemenuhan dan Perlindungan Hak Anak	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	61,90	66,00	Indikaor positif
		1.3 Meningkatnya Perlindungan Perempuan dan Anak	Persentase Kasus Kekerasan terhadap perempuan yang diselesaikan	100%	100%	Indikaor positif
			Persentase Kasus Kekerasan terhadap anak yang diselesaikan	100%	100%	Indikaor positif

3.3 Program dan Kegiatan

Program dan Kegiatan dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

TABEL 3.2
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027 PROVINSI SUMATERA SELATAN

OPD : DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

No.	Kode	Permendagri 90 Tahun 2019 (Kepmendagri 050-3708)	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Kegiatan Prioritas Daerah	Kegiatan Prioritas Nasional
		Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif		
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13
A	2.08.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah	Sumatera Selatan	100%	13,864,688,000	PAD	100%	15,864,638,000	Peningkatan Tata Kelola ASN	Reformasi Sistem Akuntabilitas Kinerja
I	2.08.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase keselarasan dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi kinerja PD	Sumatera Selatan	100%	40,000,000	PAD	100%	40,000,000	Peningkatan Tata Kelola ASN	Reformasi Sistem Akuntabilitas Kinerja
1	2.08.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Palembang	2 Dokumen	20,000,000	PAD	2 Dokumen	20,000,000	Peningkatan Tata Kelola ASN	Reformasi Sistem Akuntabilitas Kinerja

2	2.08.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Palembang	4 Laporan	20,000,000	PAD	4 Laporan	20,000,000	Peningkatan Tata Kelola ASN	Reformasi Sistem Akuntabilitas Kinerja
II	2.08.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan yang sesuai aturan	Sumatera Selatan	100%	9,228,865,000	PAD	100%	10,669,638,000	Peningkatan Tata Kelola ASN	Reformasi Sistem Akuntabilitas Kinerja
3	2.08.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Palembang	75 Orang	8,078,865,000	PAD	75 Orang	9,694,638,000	Peningkatan Tata Kelola ASN	Reformasi Sistem Akuntabilitas Kinerja
4	2.08.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Palembang	1 Dokumen	850,000,000	PAD	1 Dokumen	650,000,000	Peningkatan Tata Kelola ASN	Reformasi Sistem Akuntabilitas Kinerja
5	2.08.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Palembang	1 Dokumen	250,000,000	PAD	1 Dokumen	250,000,000	Peningkatan Tata Kelola ASN	Reformasi Sistem Akuntabilitas Kinerja
6	2.08.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Palembang	2 Laporan	50,000,000	PAD	2 Laporan	75,000,000	Peningkatan Tata Kelola ASN	Reformasi Sistem Akuntabilitas Kinerja
III	2.08.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase administrasi barang milik daerah	Sumatera Selatan	100%	35,000,000	PAD	100%	50,000,000	Pelaksanaan Inventarisasi dan Pengelolaan BMD yang Baik	Reformasi Sistem Akuntabilitas Kinerja

7	2.08.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Palembang	1 Laporan	35,000,000	PAD	1 Laporan	50,000,000	Pelaksanaan Inventarisasi dan Pengelolaan BMD yang Baik	Reformasi Sistem Akuntabilitas Kinerja
IV	2.08.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan administrasi kepegawaian PD	Sumatera Selatan	100%	500,000,000	PAD	100%	585,000,000	Peningkatan Profesionalitas ASN	Penguatan Implementasi Manajemen ASN
8	2.08.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Palembang	1 Paket	150,000,000	PAD	1 Paket	200,000,000	Peningkatan Profesionalitas ASN	Penguatan Implementasi Manajemen ASN
9	2.08.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Palembang	1 Dokumen	50,000,000	PAD	1 Dokumen	50,000,000	Peningkatan Profesionalitas ASN	Penguatan Implementasi Manajemen ASN
10	2.08.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Palembang	10 Orang	200,000,000	PAD	10 Orang	200,000,000	Peningkatan Profesionalitas ASN	Penguatan Implementasi Manajemen ASN
11	2.08.01.1.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Palembang	70 Orang	50,000,000	PAD	70 Orang	50,000,000	Peningkatan Profesionalitas ASN	Penguatan Implementasi Manajemen ASN
12	2.08.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Sumsel	6 Orang	50,000,000	PAD	8 Orang	85,000,000	Peningkatan Profesionalitas ASN	Penguatan Implementasi Manajemen ASN
V	2.08.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pengelolaan administrasi umum PD	Sumatera Selatan	100%	1,190,000,000	PAD	100%	1,560,000,000	Peningkatan Tata Kelola ASN	Reformasi Sistem Akuntabilitas Kinerja

13	2.08.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Palembang	12 Paket	30,000,000	PAD	12 Paket	50,000,000	Peningkatan Tata Kelola ASN	Reformasi Sistem Akuntabilitas Kinerja
14	2.08.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Palembang	1 Paket	200,000,000	PAD	1 Paket	400,000,000	Peningkatan Tata Kelola ASN	Reformasi Sistem Akuntabilitas Kinerja
15	2.08.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Palembang	1 Paket	50,000,000	PAD	1 Paket	100,000,000	Peningkatan Tata Kelola ASN	Reformasi Sistem Akuntabilitas Kinerja
16	2.08.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Palembang	8 Paket	200,000,000	PAD	8 Paket	250,000,000	Peningkatan Tata Kelola ASN	Reformasi Sistem Akuntabilitas Kinerja
17	2.08.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Palembang	4 Paket	75,000,000	PAD	4 Paket	75,000,000	Peningkatan Tata Kelola ASN	Reformasi Sistem Akuntabilitas Kinerja
18	2.08.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Palembang	1 Dokumen	10,000,000	PAD	1 Dokumen	10,000,000	Peningkatan Tata Kelola ASN	Reformasi Sistem Akuntabilitas Kinerja
19	2.08.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Palembang	1 Laporan	75,000,000	PAD	1 Laporan	75,000,000	Peningkatan Tata Kelola ASN	Reformasi Sistem Akuntabilitas Kinerja
20	2.08.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Palembang	2 Laporan	500,000,000	PAD	2 Laporan	550,000,000	Peningkatan Tata Kelola ASN	Reformasi Sistem Akuntabilitas Kinerja
21	2.08.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Palembang	1 Dokumen	50,000,000	PAD	1 Dokumen	50,000,000	Peningkatan Tata Kelola ASN	Reformasi Sistem Akuntabilitas Kinerja

VI	2.08.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase penyediaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Sumatera Selatan	100%	750,000,000	PAD	100%	750,000,000	Peningkatan Tata Kelola ASN	Reformasi Sistem Akuntabilitas Kinerja
22	2.08.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Palembang	8 Unit	750,000,000	PAD	8 Unit	750,000,000	Peningkatan Tata Kelola ASN	Reformasi Sistem Akuntabilitas Kinerja
VII	2.08.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Sumatera Selatan	100%	640,000,000	PAD	100%	710,000,000	Peningkatan Tata Kelola ASN	Reformasi Sistem Akuntabilitas Kinerja
23	2.08.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Palembang	1 Laporan	10,000,000	PAD	1 Laporan	10,000,000	Peningkatan Tata Kelola ASN	Reformasi Sistem Akuntabilitas Kinerja
24	2.08.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Palembang	1 Laporan	300,000,000	PAD	1 Laporan	350,000,000	Peningkatan Tata Kelola ASN	Reformasi Sistem Akuntabilitas Kinerja
25	2.08.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Palembang	1 Laporan	50,000,000	PAD	1 Laporan	50,000,000	Peningkatan Tata Kelola ASN	Reformasi Sistem Akuntabilitas Kinerja
26	2.08.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Palembang	1 Laporan	280,000,000	PAD	1 Laporan	300,000,000	Peningkatan Tata Kelola ASN	Reformasi Sistem Akuntabilitas Kinerja

VIII	2.08.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan barang milik daerah pada PD	Sumatera Selatan	100%	1,480,823,000	PAD	100	1,500,000,000	Pelaksanaan Inventarisasi dan Pengelolaan BMD yang Baik	Reformasi Sistem Akuntabilitas Kinerja
27	2.08.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Palembang	17 unit	300,000,000	PAD	17 unit	300,000,000	Pelaksanaan Inventarisasi dan Pengelolaan BMD yang Baik	Reformasi Sistem Akuntabilitas Kinerja
28	2.08.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Palembang	5 unit	30,823,000	PAD	5 unit	50,000,000	Pelaksanaan Inventarisasi dan Pengelolaan BMD yang Baik	Reformasi Sistem Akuntabilitas Kinerja
29	2.08.01.1.09.0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	Palembang	1 unit	150,000,000	PAD	1 unit	150,000,000	Pelaksanaan Inventarisasi dan Pengelolaan BMD yang Baik	Reformasi Sistem Akuntabilitas Kinerja
30	2.08.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Palembang	1 unit	500,000,000	PAD	1 unit	500,000,000	Pelaksanaan Inventarisasi dan Pengelolaan BMD yang Baik	Reformasi Sistem Akuntabilitas Kinerja
31	2.08.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Palembang	1 unit	500,000,000	PAD	1 unit	500,000,000		

B	2.08.02	PROGRAM PENGARUSTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase ARG pada BL APBD	Sumatera Selatan	27,00 %	3,500,000,000	PAD	45,00 %	3,700,000,000	Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas Perempuan dalam Dunia Kerja	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyanggah disabilitas.
IX	2.08.02.1.01	Pelebagaan Pengarustamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi	Persentase Kabupaten/Kota dan OPD Provinsi yang Melaksanakan PPRG	Sumatera Selatan	73,38 %	400,000,000	PAD	82.35 %	450,000,000	Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas Perempuan dalam Dunia Kerja	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyanggah disabilitas.

32	2.08.02.1.01.0006	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Provinsi	Palembang	1 Laporan	250,000,000	PAD	1 Laporan	250,000,000	Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas Perempuan dalam Dunia Kerja	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
33	2.08.02.1.01.0007	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG	Jumlah SDM tingkat Provinsi yang memperoleh Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG	Palembang	70 Orang	150,000,000	PAD	75 Orang	200,000,000	Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas Perempuan dalam Dunia Kerja	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.

X	2.08.02.1.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi KeMasyarakatan Kewenangan Provinsi	Jumlah peserta peningkatan pemberdayaan perempuan bid. Politik dan ekonomi	Sumatera Selatan	100 Orang	1,800,000,000	PAD	100 Orang	1,800,000,000	Peningkatan Keterlibatan Perempuan di dalam Politik	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
34	2.08.02.1.02.0003	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	Jumlah pengelola organisasi kemasyarakatan/profesi/dunia usaha/media tingkat provinsi yang mengikuti Peningkatan kapasitas dalam rangka peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Palembang	50 Orang	300,000,000	PAD	100 Orang	300,000,000	Peningkatan Keterlibatan Perempuan di dalam Politik	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.

35	2.08.02.1.02.0004	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	Jumlah organisasi kemasyarakatan/profesi/dunia usaha/media tingkat provinsi yang diAdvokasi dan didampingi dalam rangka Peningkatan Partisipasi Perempuan Di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Palembang	10 Lembaga	1,500,000,000	PAD	10 Lembaga	1,500,000,000	Peningkatan Pemberdayaan Ekonomi Perempuan	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
XI	2..08.02.1.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah Lembaga Layanan Perempuan yang bersinergi	Sumatera Selatan	47 Lembaga	1,300,000,000	PAD	47 Lembaga	1,450,000,000	Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas Perempuan dalam Dunia Kerja	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.

36	2.08.02.1.03.0004	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah LPLPP (Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan) dalam bentuk & Pusat Pembelajaran Perempuan & (PUTARAN) yang terstandarisasi tingkat Provinsi	Palembang	2 Lembaga	1,050,000,000	PAD	2 Lembaga	1,050,000,000	Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas Perempuan dalam Dunia Kerja	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
37	2.08.02.1.03.0005	Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah perempuan SIAP (Suara dan Aksi Perempuan Pelopor) di bidang Ekonomi/L estari/Sehat/Pintar/Kepemimpinan/Hukum pd LPLPP Tingkat Provinsi	Palembang	50 Orang	100,000,000	PAD	100 Orang	200,000,000	Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas Perempuan dalam Dunia Kerja	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.

38	2.08.02.1.03.0006	Pengembangan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi yang Tersedia	Palembang	1 Dokumen	150,000,000	PAD	1 Dokumen	200,000,000	Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas Perempuan dalam Dunia Kerja	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
C	2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Rasio kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO per 100.000 penduduk perempuan	Sumatera Selatan	8-10	750,000,000	PAD	8-10	900,000,000	Jenis Pelayanan Publik yang Efektif	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.

XII	2.08.03.1.01	Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kab/Kota yang melakukan pencegahan kekerasan perempuan	Sumatera Selatan	100%	100,000,000	PAD	88.24	175,000,000	Jenis Pelayanan Publik yang Efektif	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
39	2.08.03.1.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi	Palembang	1 Dokumen	50,000,000	PAD	1 Dokumen	100,000,000	Jenis Pelayanan Publik yang Efektif	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.

40	2.08.03.1.01.0002	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	Palembang	30 Perangkat Daerah	50,000,000	PAD	30 Perangkat Daerah	75,000,000	Jenis Pelayanan Publik yang Efektif	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
XIII	2.08.03.1.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kasus kekerasan perempuan yang mendapatkan layanan komprehensif	Sumatera Selatan	100%	250,000,000	PAD	100%	325,000,000	Jenis Pelayanan Publik yang Efektif	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.

41	2.08.03.1.02.0001	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan Masyarakat	Palembang	50 Orang	150,000,000	PAD	50 Orang	150,000,000	Jenis Pelayanan Publik yang Efektif	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
42	2.08.03.1.02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	Palembang	50 Layanan	100,000,000	PAD	50 Layanan	175,000,000	Jenis Pelayanan Publik yang Efektif	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.

XIV	2.08.03.1.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah lembaga layanan yang bersinergi dalam perlindungan perempuan	Sumatera Selatan	27 Lembaga	400,000,000	PAD	27 Lembaga	400,000,000	Jenis Pelayanan Publik yang Efektif	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
44	2.08.03.1.03.0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	Jumlah Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	Palembang	75 Orang	200,000,000	PAD	75 Orang	200,000,000	Jenis Pelayanan Publik yang Efektif	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.

46	2.08.03.1.03.0004	Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Palembang	1 Dokumen	200,000,000	PAD	1 Dokumen	200,000,000	Jenis Pelayanan Publik yang Efektif	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
D	2.08.04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Indeks Pemenuhan Hak Anak	Sumatera Selatan	70,00 %	750,000,000	PAD	70,50 %	800,000,000	Jenis Pelayanan Publik yang Efektif	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.

XV	2.08.04.1.01	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesenjangan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah kegiatan KIE kualitas keluarga	Sumatera Selatan	2 Kegiatan	450,000,000	PAD	2 Kegiatan	500,000,000	Jenis Pelayanan Publik yang Efektif	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
47	2.08.04.1.01.0002	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi, Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesenjangan Gender (KG) dan Perlindungan Anak Kewenangan Provinsi yang Tersedia	Palembang	1 Dokumen	250,000,000	PAD	1 Dokumen	300,000,000	Jenis Pelayanan Publik yang Efektif	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.

48	2.08.04.1.01.0003	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	Palembang	1 Dokumen	200,000,000		1 Dokumen	200,000,000	Jenis Pelayanan Publik yang Efektif	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
XVI	2.08.04.1.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah lembaga layanan keluarga yang meningkat kapasitasnya	Sumatera Selatan	10 Lembaga	200,000,000	PAD	10 Lembaga	200,000,000	Jenis Pelayanan Publik yang Efektif	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.

40	2.08.04.1.02.0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	Palembang	100 Orang	200,000,000	PAD	100 Orang	200,000,000	Jenis Pelayanan Publik yang Efektif	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
XVII	2.08.04.1.03	Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah keluarga yang diberikan layanan komprehensif	Sumatera Selatan	50 Keluarga	100,000,000	PAD	50 Keluarga	100,000,000	Jenis Pelayanan Publik yang Efektif	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.

41	2.08.04.1.03.01	Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Komprehensif bagi keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Palembang	1 Layanan	100,000,000	PAD	1 Layanan	100,000,000	Jenis Pelayanan Publik yang Efektif	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
E	2.08.05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase ARG pada BL APBD	Sumatera Selatan	27,00 %	400,000,000	PAD	24.00	450,000,000	Peningkatan Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.

XVIII	2.08.05.1.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi	Persentase kab/kota yang memiliki profil gender dan anak	Sumatera Selatan	100%	400,000,000	PAD	76.47	450,000,000	Peningkatan Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
42	2.08.05.1.01.01	Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Provinsi yang Tersedia	Palembang	2 Dokumen	250,000,000	PAD	2 Dokumen	250,000,000	Peningkatan Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.

43	2.08.05.1.01.02	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi	Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi	Palembang	2 Dokumen	150,000,000	PAD	2 Dokumen	200,000,000	Peningkatan Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
F	2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Indeks Pemenuhan Hak Anak	Sumatera Selatan	70.00	1,100,000,000	PAD	70,50 %	1,150,000,000	Jenis Pelayanan Publik yang Efektif	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.

XIX	2.08.06.1.01	Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	Persentase Kab/Kota yang mengikuti evaluasi Pemenuhan Hak Anak	Sumatera Selatan	100%	400,000,000	PAD	100%	400,000,000	Jenis Pelayanan Publik yang Efektif	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
44	2.08.06.1.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi	Palembang	1 Dokumen	150,000,000	PAD	1 Dokumen	150,000,000	Jenis Pelayanan Publik yang Efektif	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.

45	2.08.06.1.01.03	Advokasi, Sosialisasi dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	Jumlah perangkat daerah yang mempunyai dokumen pembangunan daerah yang responsif hak anak dan berperan aktif dalam Gugus Tugas KLA tingkat Provinsi yang berfungsi	Palembang	31 Perangkat Daerah	250,000,000	PAD	31 Perangkat Daerah	250,000,000	Jenis Pelayanan Publik yang Efektif	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
XX	2.08.06.1.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	Persentase Kab/Kota Yang Melaksanakan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak	Sumatera Selatan	100%	700,000,000	PAD	100%	750,000,000	Jenis Pelayanan Publik yang Efektif	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.

	2.08.06.1.02.0001	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	Palembang	100 Orang	250,000,000	PAD	100 Orang	250,000,000	Jenis Pelayanan Publik yang Efektif	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
	2.08.06.1.02.0005	Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Kegiatan kerjasama antar Lembaga penyedia layanan pemenuhan hak anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota	Palembang	1 Kegiatan	200,000,000	PAD	1 Kegiatan	200,000,000	Jenis Pelayanan Publik yang Efektif	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.

46	2.08.06.1.02.0006	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak	Jumlah kegiatan KIE Pemenuhan Hak Anak	Palembang	1 Kegiatan	250,000,000	PAD	1 Kegiatan	300,000,000	Jenis Pelayanan Publik yang Efektif	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
G	2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Rasio Kekerasan terhadap anak Per 10.000 Anak	Sumatera Selatan	0,75-1,5	1,950,000,000	PAD	0,75-1,5	2,050,000,000	Jenis Pelayanan Publik yang Efektif	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.

XX	2.08.07.1.01	Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kab/Kota yang melakukan pencegahan kekerasan anak	Sumatera Selatan	100%	100,000,000	PAD	100%	100,000,000	Jenis Pelayanan Publik yang Efektif	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
47	2.08.07.1.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi	Palembang	1 Dokumen	50,000,000	PAD	1 Dokumen	50,000,000	Jenis Pelayanan Publik yang Efektif	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.

48	2.08.07.1.01.03	Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA Kewenangan Provinsi	Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA Kewenangan Provinsi	Palembang	50 Orang	50,000,000	PAD	50 Orang	50,000,000	Jenis Pelayanan Publik yang Efektif	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
XXI	2.08.07.1.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi	Persentase kasus kekerasan anak yang mendapatkan layanan komprehensif	Sumatera Selatan	100%	300,000,000	PAD	100%	350,000,000	Jenis Pelayanan Publik yang Efektif	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.

49	2.08.07.1.02.05	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan Kewenangan Provinsi	Palembang	40 Orang	100,000,000	PAD	50 Orang	150,000,000	Jenis Pelayanan Publik yang Efektif	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
	2.08.07.1.02.06	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK Kewenangan Provinsi	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan Kewenangan Provinsi	Palembang	40 Layanan	200,000,000	PAD	50 Layanan	200,000,000	Jenis Pelayanan Publik yang Efektif	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.

XXII	2.08.07.1.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga layanan yang bersinergi dalam perlindungan perempuan	Sumatera Selatan	10 Lembaga	1,550,000,000	PAD	10 Lembaga	1,600,000,000	Jenis Pelayanan Publik yang Efektif	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
50	2.08.07.1.02.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Palembang	1 Dokumen	50,000,000	PAD	1 Dokumen	100,000,000	Jenis Pelayanan Publik yang Efektif	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.

	2.08.07.1.02.04	Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan bagi AMPK Kewenangan Provinsi	Jumlah kegiatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan AMPK Kewenangan Provinsi	Palembang	1 Kegiatan	100,000,000	PAD	1 Kegiatan	100,000,000	Jenis Pelayanan Publik yang Efektif	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
51	2.08.07.1.02.06	Pengembangan Komunikasi, Informasi, Edukasi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Palembang	1 Dokumen	100,000,000	PAD	1 Dokumen	100,000,000	Jenis Pelayanan Publik yang Efektif	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.

52	2.08.07.1.03.08	Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK Kewenangan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Usaha Kewenangan Provinsi	Palembang	200 Orang	1,300,000,000	PAD	200 Orang	1,300,000,000	Jenis Pelayanan Publik yang Efektif	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
Jumlah						22,314,688,000			24,914,638,000		

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan tahun 2026 berisi program dan kegiatan serta pagu indikatif, yang dirancang untuk mendukung terwujudnya capaian visi, misi dan tujuan pada RPJMD Provinsi Sumatera Selatan 2025 - 2029 dan untuk mendukung prioritas pembangunan daerah, maupun untuk pemenuhan pelayanan Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintah daerah.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terkait secara langsung pada pencapaian Misi Kedua dengan Tujuan Meningkatkan Kesetaraan Gender dan Perlindungan anak (Meningkatnya Pembangunan Gender dan Perlindungan anak). Selain itu juga terkait dengan pencapaian Misi Kesatu dengan Tujuan Meningkatkan perekonomian yang inklusif berbasis inovasi daerah dan Sasaran Maju Kesejahteraan Masyarakat (Menurunnya Jumlah Orang Miskin dan Desa Tertinggal) yang terkait dengan pengentasan kemiskinan serta Misi Ketiga dengan Tujuan Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Sasaran Maju Pelayanan Publik berkualitas (Meningkatnya Pelayanan Publik berkualitas), Maju Pembangunan yang Transparan dan Akuntabel (Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas) dan Maju Aparatur Profesional dan Berintegritas (Meningkatnya profesionalisme dan integritas aparatur pemerintah daerah).

Sebagai Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan melaksanakan urusan wajib non pelayanan dasar urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

4.1 PRIORITAS PERANGKAT DAERAH YANG MENDUKUNG PRIORITAS PROVINSI

Tabel 4.1

Prioritas Perangkat Daerah yang Mendukung Prioritas Provinsi

No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/SubKegiatan	Ket
1	Program Kesejahteraan dan Kesehatan Perempuan dan Anak	Meningkatnya kualitas hidup perempuan dan anak		
		- Perempuan lebih berdaya dalam mengambil keputusan terkait dan kesejahteraan keluarga.	Peningkatan kapasitas SDM pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Provinsi	
		Meningkatnya kesejahteraan perempuan dan anak		
		- Berkurangnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak akibat lemahnya kondisi sosial-ekonomi.	Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	
			Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	
			Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	
			Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	
		- Peningkatan kesejahteraan keluarga, terutama keluarga rentan, perempuan kepala keluarga, dan anak .	Peningkatan kapasitas Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	
		Meningkatnya kesadaran dan partisipasi masyarakat		
		- Tingginya pemahaman keluarga dan masyarakat	Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP dan TPPO kepada pengambil kebijakan dan pemangku	

		tentang pola asuh anak yang sehat, serta pentingnya perlindungan perempuan dan anak.	kepentingan Kewenangan Provinsi	
			Advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak AnakKewenangan Provinsi	
			Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	
		- Terwujudnya lingkungan sosial yang mendukung tumbuh kembang anak secara optimal dan terlindungi serta terpenuhinya hak hak anak	Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	
			Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	

4.2 Pagu Indikatif dan Sumber Pendanaan

Pagu indikatif Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026 merupakan batas maksimal alokasi anggaran yang direncanakan untuk mendukung pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan prioritas pembangunan daerah. Penetapan pagu indikatif ini mengacu pada arah kebijakan fiskal daerah, prioritas RKPD Tahun 2026, serta mempertimbangkan kebutuhan riil dalam pencapaian target kinerja DPPPA. Selain itu, penyusunan pagu dilakukan dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas.

Secara umum, alokasi pagu indikatif DPPPA Tahun 2026 diarahkan pada:

- Peningkatan kualitas layanan perlindungan perempuan dan anak, termasuk penguatan UPTD PPA
- Penguatan upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak
- Peningkatan pemberdayaan ekonomi perempuan
- Penguatan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) di seluruh perangkat daerah
- Pengembangan sistem data gender dan anak
- Dukungan manajemen dan tata kelola perangkat daerah

Rencana kerja dan kegiatan prioritas Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel 4.2 :

Tabel 4.2
Prioritas Perangkat Daerah
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Provinsi Sumatera Selatan

Prioritas Perangkat Daerah	Target	Lokasi	Program/ Kegiatan Nomenklatur	Pagu Dana (Ribu Rp)	Ket	Cek Renja/ RKA	Catatan
Meningkatnya Kualitas Hidup Perempuan		Prov. Sumsel	➤ Program Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Pemberdayaan Perempuan	2.070.000.000		√	
			➤ Program Peningkatan Kualitas Keluarga	530.000.000		√	

Meningkatnya Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak		Prov. Sumsel	➤ Program Perlindungan Perempuan	449.785.000		√	
			➤ Program Perlindungan Khusus Anak	1.335.000.000		√	
Peningkatan pemenuhan hak anak		Prov. Sumsel	➤ Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	350.000.000		√	
			➤ Program Pemenuhan Hak Anaks	580.000.000		√	
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi		Prov. Sumsel	➤ Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	10.720.965.000		√	

Sumber Pendanaan

Sumber pendanaan pelaksanaan program dan kegiatan DPPPA Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026 berasal dari:

- 1. **Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumatera Selatan**
Merupakan sumber utama pendanaan yang digunakan untuk membiayai seluruh program dan kegiatan DPPPA sesuai dengan kewenangan provinsi.
- 2. **Dana Transfer Pemerintah Pusat**
Berupa dana yang bersumber dari pemerintah pusat, seperti Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik atau sumber lainnya yang mendukung pelaksanaan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- 3. **Sumber Pendanaan Lain yang Sah dan Tidak Mengikat**
Dapat berupa kerja sama dengan pihak ketiga, dunia usaha melalui program tanggung jawab sosial (CSR), serta dukungan dari lembaga non-pemerintah sepanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PENUTUP

Demikianlah penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026. Penyusunan Renja merupakan kegiatan yang bertujuan untuk mencapai kinerja dalam upaya mencapai Visi dan Misi Kepala Daerah melalui perencanaan yang baik, sehingga diharapkan akan mencapai output kinerja sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Melalui rencana kerja pula dapat dilakukan pengawasan dan evaluasi kinerja sehingga program dan kegiatan berhasil dilaksanakan.

Di dalam Renja ini berisi kaidah-kaidah pelaksanaan Renja yang wajib dipedomani oleh seluruh unit kerja di lingkungan organisasi yaitu :

1. Seluruh unit kerja di lingkungan organisasi berkewajiban untuk melaksanakan program-program dalam Renja organisasi Tahun 2026 secara murni dan konsekuen;
2. Seluruh unit kerja di lingkungan organisasi berkewajiban menjaga keterkaitan program dan kegiatan yang dilaksanakan dengan prioritas pembangunan Sumatera Selatan;
3. Seluruh unit kerja di lingkungan organisasi berkewajiban untuk menggunakan sumber daya organisasi secara efektif, efisien dan ekonomis melalui manajemen yang berkualitas.

Renja ini akan dipakai sebagai acuan dasar dalam pengambilan langkah dan keputusan yang akan ditempuh organisasi secara terencana dan terkoordinasi dengan harmonis, sehingga diharapkan dapat memacu pelaksanaan akuntabilitas kinerja pemerintah dengan melibatkan stakeholder sehingga nantinya akan tercipta sasaran dan hasil kinerja yang dapat di pertanggung jawabkan kepada pimpinan secara organisasi, secara moral akan dipertanggungjawabkan kepada publik.

Oleh karena itu diminta seluruh staf Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan untuk bekerja dengan sebaik-baiknya, penuh integritas dan tanggung jawab.

Demikian penyusunan Rencana Kerja (Renja) ini telah diupayakan sebaik – baiknya, terukur dan akuntabel. Namun kami menyadari bahwa masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam penyusunan Renja ini, untuk itu kami mengharapkan masukan dari berbagai pihak untuk perbaikan-perbaikan dimasa mendatang.

Palembang, 16 Desember 2025
**KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
PROV. SUMSEL,**



MUHAMMAD ZAKI ASLAM, S.IP.,M.Si
Pembina Utama Madya/ IV.d
NIP 197306261993111001